

**PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, KOMITMEN MANAJEMEN DAN SISTEM PENGENDALIAN PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu)

Oleh :

**Rian Noprizal**

**Pembimbing : Amries Rusli Tanjung dan Eka Hariyani**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

*Email : [rian\\_noprizal@yahoo.com](mailto:rian_noprizal@yahoo.com)*

*Effect of External Pressure, Environmental Uncertainty, Management Commitment, and Government Internal Control System to The Application Management Financial Transparency Reporting (Empirical Study on Skpd In Indragiri Hulu)*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to explore the influence of the external pressure, environmental uncertainty, management commitment and government internal control system to the application management financial transparency reporting at the offices in Indragiri Hulu Distict. The samples were determined based on purposive sampling technique. The respondents involved to be the sample of this study consisted of subsections head of finance, treasurer finance and financial staff working at any agencies around the SKPD office in Indragiri Hulu regency (87 respondents), where the data was collected through questionnaires distributed. The analysis is based on respondents' answers were obtained through questionnaires distributed by the researchers. Mechanical analysis using multiple linear regression analysis with SPSS. The results of this study indicated that the external pressure, environmental uncertainty, management commitment, internal control system significantly affect the transparency of financial reporting. The magnitude of the effect ( $R^2$ ) of the external pressure, commitment of management and government internal control system to the application management financial transparency reporting was 76,6 %, While the remaining 23,4 % is influenced by other variables outside.*

*Keywords : transparency, external pressure, environmental uncertainty, management commitment, internal control system.*

**PENDAHULUAN**

Otonomi daerah di Indonesia pada saat ini mencerminkan adanya

respon rakyat yang sangat tinggi akan meningkatnya permintaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*). Salah satu yang

menjadi sorotan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik adalah terciptanya transparansi pengelolaan keuangan di organisasi-organisasi yang ada di dalam pemerintahan (Johannes, 2013).

Dalam mekanisme tata kelola, pelaporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu organisasi yang transparan dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Hess, 2007). Masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan (Stiglitz, 1999) serta bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya (Silver, 2005).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi padapeningkatan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat : (1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, (3) membudayakan dan menciptakan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2010).

Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses

aktivitas politik, ekonomi, pemerintah dan keputusannya. Transparansi mungkin semua stakeholders dapat melihat struktur dan fungsi pemerintah, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban periode yang lalu. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dimana informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2010).

Penerapan Transparansi adalah cara mendapatkan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja (Silvia, 2009)

Beberapa daerah telah menerbitkan Perda terkait transparansi dan partisipasi masyarakat sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terbit. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari akan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Akan tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah ini masih sulit untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah terutama pada SKPD sebagai level pelaksana.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah

kabupaten indragiri hulu dari hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten indragiri hulu, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian dari 2011 sampai dengan 2014, suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena dari tahun ke tahun kabupaten indragiri hulu tidak mengalami perubahan Opini.

Tekanan eksternal ini berasal dari luar organisasi yaitu seperti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya peraturan tersebut ditunjukkan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik (Ridha, 2012). Akan tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah tersebut masih sulit untuk di terapkan oleh pemerintah daerah terutama pada SKPD sebagai level pelaksana.

Ketidakpastian lingkungan merupakan Ketidaksiapan organisasi terhadap suatu standar berupa peraturan akan mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi dalam bertransformasi ke peraturan yang baru. Dalam situasi yang tidak pasti, pemimpin organisasi akan memutuskan bahwa respon terbaik yang dapat dilakukan organisasi adalah dengan meniru organisasi yang mereka anggap berhasil (Deddi, 2014).

Komitmen merupakan sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan organisasinya. Dapat diartikan bahwa komitmen manajemen akan mengandung unsur loyalitas terhadap organisasi keterlibatan dalam kinerja untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih baik (Robbins dan Judge, 2007).

Selain itu pengendalian intern dalam pelaksanaannya juga harus diuji keefektifitasannya. Penentuan apakah pengendalian telah diimplementasikan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat serta apakah pelaksana sudah memiliki kewenangan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan pengendalian tersebut secara efektif merupakan tujuan dari dilaksanakannya pengujian pengendalian intern (Arens, 2008). Seperti yang kita ketahui, jika pengendalian internal tersebut terimplementasikan dengan efisien dan efektif sertaperaturan perundang-undangan dijalankan maka pelaporan keuangan yang dihasilkan andal, asset milik negara tetap aman dan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut PP No.60 tahun 2008, salah satu komponen dalam lingkungan pengendalian yang wajib diciptakan dan dipelihara sehingga menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern adalah melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

Penelitian ini merupakan Modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ridha dan basuki (2012) dengan judul penelitian "Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan SKPD di Provinsi D.I.Yogyakarta". dan menambahkan satu variable yaitu sistem pengendalian internal pemerintah dari Diana sari (2012).

Berdasarkan latar belakang yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Apakah tekanan eksternal

berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu? 2) Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu? 3) Apakah komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu? 4) Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu?

Tujuan penelitian ini adalah

1) Pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu. 2) Pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu. 3) Pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu. 4) Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

## TELAAH PUSTAKA

### **Penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah**

Penerapan transparansi adalah cara mendapatkan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu,

masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja (Silvia, 2009).

Menurut Mardiasmo (2010), transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi. Sementaraitu, Mohamad (2004), menyatakan bahwa esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas, sedangkan esensi dari akuntabilitas adalah keterbukaan (transparansi).

### **Tekanan Eksternal**

Tekanan eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tekanan ini berasal dari luar organisasi yaitu seperti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya peraturan tersebut ditunjukkan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik (Ridha, 2012). Akan tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah tersebut masih sulit

untuk di terapkan oleh pemerintah daerah terutama pada SKPD sebagai level pelaksana.

Tekanan eksternal dapat dikatakan juga sebagai dorongan atau penolakan untuk dilaksanakannya sebuah kebijakan yang berasal dari luar perusahaan, seperti dukungan atau penolakan dari masyarakat, atau pun dorongan atau larangan dari pemerintah dalam bentuk peraturan atau tatanan hukum dan norma yang berlaku dimasyarakat. Tekanan eksternal selalu terkait dengan segala hal yang terhubung dengan lingkungan di sekitar organisasi. Tekanan eksternal membuat seluruh anggota organisasi melaksanakan proses kegiatan operasional dengan semestinya, proses tersebut dilakukan dengan lebih terbuka seperti menggunakan tenaga auditor eksternal yang bersifat independen, ketika proses tersebut berhasil dilaksanakan tentu proses transparansi pelaporan keuangan mengalami peningkatan (Dewi, 2015).

### **Ketidakpastian Lingkungan**

Ketidakpastian lingkungan merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan organisasi melakukan penyesuaian terhadap kondisi organisasi dengan lingkungan. Dalam teori institusional, organisasi ditekan menjadi semakin sama, kadang-kadang karena kendala lingkungan (DiMaggio dan Powell 1983 dalam Ridha, 2012).

Deddi (2013) Ketidakpastian lingkungan dalam hal ini adalah kondisi dimana SKPD mengalami ketidakpastian yang dapat disebabkan adanya pengaruh dari luar SKPD, seperti sering terjadinya perubahan peraturan, tidak *match-*

nya antara peraturan yang satu dengan yang lain, terjadinya mutasi staf SKPD yang cepat, dan lain sebagainya. SKPD dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dengan kondisi yang ada, baik dalam praktik maupun operasionalnya. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan.

### **Komitmen Manajemen**

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Richard M. Steers (Kuntjoro, 2002) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Steers berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan kondisi dimana pegawai sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-nilai dan sasaran organisasinya. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan.

### **Sistem Pengendalian Internal pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah : 1) Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah. 2) Keandalan pelaporan keuangan. 3) Pengamanan aset negara. 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan *Internal Control-Integrated Framework* yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* (1994), Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, direksi atau top manajemen, personel-personel lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: 1) Keandalan dari pelaporan keuangan. 2) Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. 3) Efektivitas dan Efisiensi operasi.

**Pengaruh Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan**

### **Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Tekanan eksternal menurut penelitian yang dilakukan oleh Asmidawati (2013) menunjukkan bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan di SKPD di Provinsi Riau memberikan pengaruh tekanan eksternal yang positif dan signifikan. Hasil ini mendukung penelitian solin (2013) yang membuktikan bahwa tekanan eksternal memberikan pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan Tekanan eksternal yang terbentuk dari luar seperti adanya peraturan pemerintah, tekanan masyarakat ataupun dorongan dari pihak tertentu memperlancar proses transparansi untuk dilakukan dalam bentuk penyajian laporan keuangan.

### **Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah**

Hasil penelitian solin (2013) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan transparansi pelaporan keuangan, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi yang terbentuk adalah positif, temuan tersebut menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan yang tinggi mendorong percepatan terjadi proses transparansi didalam pelaporan keuangan daerah. Perubahan lingkungan tentu akan menciptakan tantangan serta mempengaruhi kredibilitas lembaga pemerintah daerah didalam diri masyarakat.

**Pengaruh Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan**

## Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Johannes (2013), Asmidawati (2013) dan Solin (2013) menunjukkan bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan di pengaruhi oleh komitmen manajemen. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Edy dan Sinarwati (2015). Hal ini berarti semakin tinggi komitmen manajemen aparat pemda maka semakin tinggi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tingginya komitmen manajemen dalam melaksanakan aturan dan prosedur organisasi tentu akan mendorong meningkatnya transparansi pelaporan keuangan. Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat. Sistem manajemen yang baik, yaitu apabila SKPD memiliki staf yang handal dan kompeten dibidangnya akan berdampak pada tercapainya transparansi pelaporan keuangan sehingga standar profesionalisme pada SKPD dapat terpenuhi.

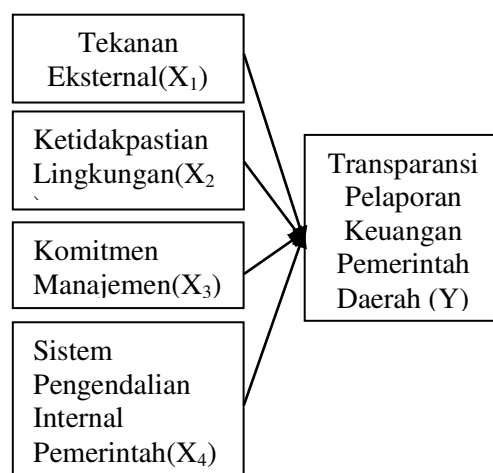
## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah

Terwujudnya transparansi laporan keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan Negara.

Diana (2012) menemukan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi transparansi laporan keuangan dengan arah hubungan positif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah yang meliputi keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional, pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan secara umum termasuk kedalam kategori baik pada pemerintah kota Cimahi.

## Model Penelitian

Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:



Sumber : *Data Olahan, 2016*

## Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan adalah :

- H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah kabupaten indragiri hulu.
- H<sub>2</sub>: Terdapat ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi

pelaporan keuangan kabupaten Indragiri Hulu.

H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

H<sub>4</sub>: Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

## METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Sampel penelitian ini terdiri dari kepala sub bagian keuangan, Bendahara keuangan dan staff keuangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 87 responden.

### Pengujian Kualitas Data

#### 1. Uji Validitas

Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas pertanyaan/ pernyataan kuisisioner adalah Metode Corrected Item-Total Correlation dengan menggunakan SPSS. Pada uji ini melakukan perbandingan antara r-hitung pada masing-masing pernyataan dengan r-tabel. Jika r-hitung > r-tabel maka dapat dikatakan valid atau dapat juga membandingkan nilai signifikansi dari tipe pernyataan dengan nilai alpha 5% (Wijaya, 2012).

#### 2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur tingkat konsistensi instrumen yang digunakan. Pengujian reliabilitas ini

menggunakan uji statistik cronbach's alpha dengan menggunakan indeks numerik yang dibuat koefisien. Instrumen yang digunakan dalam variabel dikatakan reliabel (handal) apabila memiliki koefisien alpha lebih dari 0,60 (Ghozali, 2013). Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan aplikasi SPSS.

### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan Uji *kolmogorove smirnov* digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, *poisson*, *uniform*, atau *exponential*. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusinormal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Priyatno, 2013).

### Pengujian Asumsi Klasik

#### 1. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk memenuhi asumsi heteroskedastisitas, maka perlu diuji ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.



## 2. Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan periode  $t - 1$  pada persamaan regresi linear. Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan adanya problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson (DW) jika angka DW dibawah  $-2$ , maka terdapat autokorelasi positif. Jika angka DW diantara  $-2$  sampai  $+2$ , maka tidak terdapat autokorelasi. Jika DW diatas  $+2$ , maka terdapat autokorelasi negatif.

## Pengujian Hipotesis

### 1. Uji $t$

Uji ini membandingkan  $t$  hitung dengan  $t$  tabel yaitu bila  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel berarti bahwa variabel independen mampu mempengaruhi terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika  $t$  hitung dengan  $t$  tabel yaitu bila  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel berarti bahwa variabel independennya tidak mampu mempengaruhi terhadap variabel dependen.

### 2. Koefisien Determinasi ( $R_2$ )

Koefisien Determinansi ( $R_2$ ) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar variabel koefisien determinasinya semakin baik variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian, persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk

mengestimasi nilai variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengembalian kuesioner

Keseluruhan kuesioner yang dibagikan sebanyak 87 eksemplar. Dari jumlah kuesioner yang dibagikan tersebut, kuesioner yang dikembalikan sebanyak 72 kuesioner (85,71%).

### Hasil Uji Kualitas Data

#### 1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka item-item pernyataan dinyatakan valid (Wijaya, 2012). Nilai  $r$  hitung dalam uji ini *Corrected Item Total Correlation*. Sedangkan nilai  $r$  tabel dapat dilihat pada tabel  $r$  dengan persamaan  $N-2 = 72-2 = 70 = 0,232$ . Dan dari tabel diatas diperoleh nilai  $r$  hitung seluruh pernyataan  $>$   $r$  tabel (0,223). Artinya adalah alat ukur yang digunakan valid (Wijaya, 2012).

#### 2. Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam Ghazali, 2013). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha  $>$  0.60 (Imam Ghazali, 2013).

### Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah variabel yang diuji memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal dapat dilihat dari grafik P-Plot dan analisis statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusan dalam grafik P-Plot ini adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas.

### Pengujian Asumsi Klasik

#### 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas yaitu untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi, dengan cara melihat nilai (1) tolerance dan (2) Variance Inflation Factor (VIF). Nilai tolerance untuk seluruh variabel independen  $> 0,10$  dan untuk VIF  $< 10$ , dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Tolerance dan VIF**

Model	Collinearity Statistics		Ket
	Tolerance	VIF	
TE (X1)	0,384	2,602	Bebas Multikolinieritas
KL (X2)	0,454	2,202	
KM (X3)	0,367	2,721	
SPIP (X4)	0,862	1,161	

Sumber : Data Olahan, 2016

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan uji glejser (*glejser test*). Nilai dari hasil uji glejser kurang dari atau sama dengan 0,05 maka dapat dikatakan mengalami gangguan heteroskedas-

tisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Glejser**

Model	Uns.Cofs		Std. Cofs	t	Sig
	B	Std.Err	Beta		
(Const)	1,685	0,623		2,705	0,009
TK	0,048	0,046	-0,208	1,044	0,300
KL	-0,031	0,043	-0,131	0,733	0,466
KM	-0,063	0,057	0,220	1,089	0,280
SPIP	0,024	0,008	-0,393	0,082	0,300

Sumber : Data Olahan, 2016

#### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah didalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Durbin-Watson**

Model	Durbin-Watson	Keterangan
1	1,712	Tidak terdapat Autokorelasi

Sumber : Data Olahan, 2016

#### Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel independen (pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan sistem pengendalian internal pemerintah) terhadap variabel dependen (Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah) secara parsial. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 4**  
**Hasil Uji t**

Model	Uns.Cofs		Std. Cofs	t	Sig
	B	Std. Err	Beta		
(Const)	2,662	1,085		2,453	0,017
TK (X <sub>1</sub> )	0,276	0,077	0,331	3,572	0,001
KL (X <sub>2</sub> )	0,218	0,073	0,245	2,978	0,004
KM (X <sub>3</sub> )	0,330	0,096	0,324	3,424	0,001
SPIP(X <sub>4</sub> )	0,034	0,014	0,014	2,545	0,013

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda :

$$Y = 2,662 + 0,276 X_1 + 0,218 X_2 + 0,330 X_3 + 0,034 X_4 + e$$

### Pembahasan Hasil Penelitian Hasil Hipotesis Pertama

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa Dengan demikian nilai t hitung (3,572) > t tabel (1,996) dan signifikansi t sebesar (0,001) < (0,05) artinya signifikan. Signifikan disini berarti Ha<sub>1</sub> diterima dan H0<sub>1</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah.

### Hasil Hipotesis kedua

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung (2,978) > t tabel (1,996) dan signifikansi t sebesar (0,004) < (0,05) artinya signifikan. Signifikan disini berarti Ha<sub>2</sub> diterima dan H0<sub>2</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah.

### Hasil Hipotesis Ketiga

Dari tabel 4 dapat dilihat nilai t hitung (3,424) > t tabel (1,996) dan

signifikansi t sebesar (0,001) < (0,05) artinya signifikan. Signifikan disini berarti Ha<sub>3</sub> diterima dan H0<sub>3</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah.

### Hasil Hipotesis Keempat

Dari tabel 4 dapat dilihat nilai t hitung (2,545) > t tabel (1,996) dan signifikansi t sebesar (0,013) < (0,05) artinya signifikan. Signifikan disini berarti Ha<sub>4</sub> diterima dan H0<sub>4</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah.

### Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tingkat Koefisien determinasi dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 5**  
**Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,883 <sup>a</sup>	0,779	0,766

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa nilai R Square sebesar 0,779. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 76,6 %, sedangkan sisanya sebesar 23,4 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan,

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan uji regresi dapat disimpulkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Berdasarkan uji regresi dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Berdasarkan uji regresi dapat disimpulkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Berdasarkan uji regresi dapat disimpulkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan, diperoleh saran penelitian sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian diatas, maka saran peneliti kepada peneliti selanjutnya adalah penggunaan selain metode kuesioner seperti metode interview dapat digunakan untuk mendapatkan komunikasi dua arah dengan subyek dan mendapatkan kejujuran jawaban subjek, memperluas cakupan sampel dan populasi yang digunakan, dan dengan metode interview diharapkan peneliti untuk dapat memandu para responden untuk

mengisi ataupun menjawab kuesioner.

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah atau regulator khususnya mengenai transparansi pelaporan keuangan dan penerapannya serta pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah untuk kedepannya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan responden pada khususnya mengenai hubungan tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan khususnya yang diterapkan di sektor pemerintahan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmidawati. 2013. *Pengaruh Tekanan Eksternal dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan*. Jurnal Universitas Riau.
- Ashworth, R., G. Boyne., dan R. Delbridge. 2009. *Escape from the Iron Cage Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector*. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta

- COSO, 1994, *Internal Control Integrated Framework*, New York : AIGPA's Publication Division.
- Dacin, M. T., J. Goodstein., dan W. R. Scott. 2002. *Institutional Theory and Institutional Change: Introduction to the Special Research Forum. The Academy of Management Journal.*
- Dewi, Ratna. 2015. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Tekanan Eksternal, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.* Jurnal. Universitas STIESIA.
- DiMaggio, P. J. dan W. W. Powell. 1983. *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review.*
- Fardian, deddi. 2014. *Pengaruh factor politik, ketidakpastian lingkungan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.* Jurnal Universitas Negeri Padang.
- Frumkin, P. dan J. Galaskiewicz. 2004. *Institutional Isomorphism and Public Sector Organizations.*Journal of Public Administration Research and Theory.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Partial Least Square*, Edisikedua, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hess, D. 2007. *Social Reporting and New Governance Regulation: The Prospects of Achieving Corporate Accountability Through Transparency. Business Ethics Quarterly.*
- Indriantoro, Nurdan bambang supono. 2006. *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen (Ed. 1 ) BPF.* Yogyakarta.
- Johannes, Sihaloho. 2013. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.* Jurnal Universitas Riau.
- Mardiasmo, 2006. *Otonomidan Manajemen Keuangan Daerah.* Andi, Yokyakarta.
- Mardiasmo.2010. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi SektorPublik.* Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol 2 No. 1.
- Mulyono, Budi 2006, *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Pengelolaan Keuangan Daerah,* Vol. 2 No. 1, Mei.
- Nela, Dwi Dan Etika. 2013. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan*

- Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah. Jurnal Penelitian Terdahulu Universitas Bung Hatta.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Informasi Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- Ridha, M. Arsyandi dan Hardi Basuki, 2012. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Mana-jemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.* Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 2012.
- Sukhemi, 2011. *Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Transparansi Keuangan Daerah (Provinsi D.I. Yogyakarta),* Jurnal. Volume 8, 2011: 84-95.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis.* Alfabet, Bandung.
- Sari, Diana. 2012. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan.* Jurnal Penelitian Terdahulu Universitas Padjajaran, Bandung (Studi Empiris Pada SKPD Kota Cimahi).
- Silvia 2013 *Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, Dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh).* Skripsi.
- Silver, D. 2005. *Creating Transparency for Public Companies The Convergence of PR and IR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace. Public Relations Strategist.*
- Stiglitz, J.E.1999. *On Liberty, the right to know, and public Discourse: the role of transparency in public life.* Oxford Amnesty Lecture, Oxford, U.K.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara* ([www.transparency.org](http://www.transparency.org))  
([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id))

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara* ([www.inhukab.go.id](http://www.inhukab.go.id))

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Otonomi Daerah*  
Wayan, Ni Septiani Dewi, Edy Sujana dan Ni Kadek Sinarwati, 2015. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan*. Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha.